

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka peneliti mencoba untuk menyertakan beberapa kajian sebelumnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Adapun kajian-kajian sebelumnya adalah:

Pertama, penelitian oleh Heni Merina dalam jurnal *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2014, hal 515-532 dengan judul “Kontruksi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Negeri Surabaya Tentang Pendidikan Multikultur” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Hasil penelitian yang diperoleh data mahasiswa PPKn memahami pendidikan multikultur sebagai pendidikan yang mengajarkan tentang berbagai macam perbedaan serta bertujuan menanamkan sikap toleransi yang tinggi terhadap keberagaman. Mahasiswa PPKn meyakini bahwa pendidikan multikultur sangat penting dan sesuai diajarkan di prodi PPKn. Praktik kehidupan multikultural mahasiswa diwujudkan dengan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama mahasiswa. Adanya berbagai perbedaan dan kemajemukan tidak menjadikan alasan bagi mereka untuk saling membeda-bedakan dan menjatuhkan satu dengan lain. Hasil penelitian yang telah dianalisis menyimpulkan bahwa, konstruksi mahasiswa program studi S1 PPKn tentang Pendidikan Multikultur masih

belum utuh, terbukti dengan ketidakmampuan mahasiswa PPKn dalam menjelaskan makna Pendidikan Multikultur.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada materi yang berkaitan dengan pendidikan multikultural. Sedangkan perbedaannya adalah jenis penelitian jika sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi, maka penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif (*Library Research*).

Kedua, penelitian oleh Lilik Andaryuni dalam jurnal *FENOMENA*, Vol 6 No 1, 2014 dengan judul “Pendidikan Multikultural di Perguruan Tinggi (Studi Terhadap STAIN Samarinda)” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi pendidikan multikultural di STAIN Samarinda, bagaimana dukungan lembaga lain terhadap pengembangan pendidikan multikultural di STAIN Samarinda, dan bagaimana strategi penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural pada pembelajaran di STAIN Samarinda. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa (1) STAIN mendapat dukungan dari lembaga lain, hal ini dibuktikan dengan banyaknya MoU yang ditandatangani oleh pihak STAIN Samarinda dengan pihak lain, baik dari lembaga pendidikan, lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank, lembaga peradilan, dan lain sebagainya; (2) sensitifitas gender, dibentuknya PSG, tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam menduduki jabatan tertentu; (3) Kemahasiswaan, adanya BEM, UKM-UKM, Pelatihan dan seminar, (4) Hubungan antar pimpinan dan dosen / karyawan; program *coffe*

morning, senam pagi; (5) Silabi mencakup nilai-nilai multikultural; (6) Internalisasi konsep pendidikan multikultural oleh dosen dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran terlaksana dengan baik.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas pendidikan multikultural. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya meneliti pendidikan multikultural di instansi perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini menelaah pendidikan multikultural dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 11-13.

Ketiga, penelitian oleh Ahmad Noor Fida, S.Pd., M.Pd. dalam jurnal *PPKn & Hukum* Vol. 11 No.2 oktober 2016 dengan judul "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Sosiologi SMA.". Penelitian ini membahas tentang kesiapan perangkat pembelajaran guru terkait materi pendidikan multikultural, bagaimana pemahaman guru sosiologi dalam materi pendidikan multikultural, bagaimana proses pembelajaran sosiologi pada materi pendidikan multikultural, bagaimana dampak implementasi pendidikan multikultural terhadap mutu pembelajaran sosiologi. Hasil penelitian ini adalah (1) guru dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan multikultural sudah baik, (2) dalam proses pembelajaran pengembangannya masih sebatas kognitif dan hanya sedikit mengangkat ranah afektif, (3) sarana prasarana yang kurang memadai (4) dampak implementasi pendidikan multikultural terhadap mutu pembelajaran sosiologi justru sangat positif.

Keempat, penelitian oleh Bunyamin dalam *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* Volume 7, Nomor 2, September 2016 dengan judul “Pendidikan Multikultural Menuju Masyarakat Bermartabat”. Penelitian ini mengungkapkan secara mendalam tentang pendidikan multikultural untuk menunjukkan gagasan pembentukan sistem pendidikan menggunakan konsep multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis situasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep pendidikan multikultural harus berusaha memfasilitasi proses pembelajaran yang menghargai keragaman etnis dan perbedaan, persamaan hak, toleransi dan sikap terbuka. Mengembangkan kompetensi untuk mampu mandiri dan mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pihak lain, bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan sebagai dasar masyarakat yang beradab berdasarkan pada 4 pilar pendidikan.

Kelima, jurnal oleh Nana Najmina dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1) (2018): 52-56 dengan judul “Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia”. Artikel ini bertujuan untuk mendiskripsikan pendidikan multikultural dalam membentuk karakter bangsa. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Artikel ini menjelaskan bahwa pendidikan multikultural harus diterapkan dalam proses pembelajaran melalui pembiasaan, pembelajaran multikultural dilaksanakan dengan pembentukan pola pikir, sikap, tindakan, dan pembiasaan sehingga muncul kesadaran nasional keindonesiaan.

Keenam, kajian yang ditulis oleh Dede Rosyda dalam jurnal *Sosio Didaktika*: Vol.1 No.1 Mei 2014 dengan judul “Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional” kajian ini memberikan gambaran mengenai pandangan pendidikan multikultural secara konsepsional. Pendidikan multikultural dalam hal ini bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan memberikan hak sama bagi etnik minoritas, sebagai upaya memperkuat kesatuan, identitas nasional dan membangun keadilan yang makmur dan sejahtera melalui sekolah-sekolah yang di desain sedemikian rupa termasuk dalam proses pembelajaran hingga mempersiapkan pendidik yang memiliki persepsi tentang pendidikan multikultural.

Ketujuh, jurnal *Diskursus Islam* Vol.3 No.1, 2015 ditulis oleh Muh. Sain Hanafy dengan judul “Pendidikan Multikultural dan Dinamika Ruang Kebangsaan” dalam kajian ini penulis menjelaskan bahwa munculnya kelompok-kelompok baru dalam kehidupan sosial di Indonesia dapat memicu konflik, ketika masing-masing kelompok menganggap kelompoknya yang paling benar. Masalah tersebut akan sangat sukar untuk dicari solusinya, maka dari itu sebagai salah satu alternative solusi adalah dengan pendidikan multikultural. Dengan pendekatan nilai-nilai multikultural agar integrasi dan interaksi bisa berjalan dengan damai untuk menumbuhkan rasa toleransi, demokratis, humanis dan menjaga kebersamaan sesuai cita-cita negara Pancasila.

Kedelapan, jurnal *TAPIS* Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014 ditulis oleh Lasijan dengan judul “Multikultural dalam Pendidikan Islam”. Jurnal tersebut menerangkan bahwa munculnya pendidikan multikultural merupakan bentuk respon atas fenomena sosial, budaya, etnis yang seringkali muncul di tengah tengah masyarakat yang majemuk. Pendidikan multikultural dalam hal ini adalah upaya menekankan penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keberagaman budaya yang berkembang di tengah masyarakat plural. Tujuan akhir pendidikan multikultural adalah menciptakan generasi muda bangsa yang beerilmu dan terampil namun dapat menjalani kehidupan bermasyarakat sebagai khoiru ummah.

Kesembilan, jurnal *Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Vol.2 No.1, 2014 ditulis oleh Supardi dengan judul “Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah Lokal”. Dalam kajian jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa pendidikan merupakan media efektif untuk menanamkan kesadaran akan keanekaragaman yang ada di tengah tengah masyarakat plural. Pendidikan sejarah merupakan salah satu konsep yang bertujuan membangun sikap toleransi, demokrasi, dan kesadaran multikultural. Kegunaan pembelajaran sejarah lokal yang efektif menjadi upaya untuk membangun dan mengembangkan kesadaran akan keanekaragaman budaya. Model pengajaran yang digunakan merupakan 1) mempelajari pengalaman masa lalu; 2) studi kasus berbagai perbedaan; 3) pengembangan strategi pembelajaran; 4) pengembangan kurikulum; 5)

menyisipkan pengajaran sejarah lokal dalam materi yang berhubungan dengan sejarah nasional.

Kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Lu'lu' Nurhusna pada tahun 2014 dengan judul "Multikulturalisme Azyumardi Azra dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep multikulturalisme menurut Azyumardi Azra dan relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai multikulturalisme menurut Azyumardi Azra, ekspresi religius yang diteliti dapat berupa simbol-simbol yang digunakan dalam pemikiran Azyumardi Azra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai-nilai inti multikulturalisme menurut Azra adalah keragaman, kesetaraan, kemanusiaan, keadilan dan nilai-nilai demokrasi. Sedangkan relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam adalah materi yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam mengandung nilai-nilai multikulturalisme yang digagas oleh Azra. Peneliti juga merekomendasikan bahwa nilai-nilai multikultural tersebut dapat di internalisasikan dalam metode pembelajaran langsung (*direct learning*), pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*), dan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*).

Dalam penelitian-penelitian terdahulu peneliti dapat melihat kesamaan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama meneliti tentang Pendidikan Multikultural. Sebagian menggunakan penelitian pustaka

serupa, namun dengan variabel yang berbeda. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang Pendidikan Multikultural dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 11-13 dalam *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka.

B. Kerangka Teori

1. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural menurut James Banks merupakan serangkaian kepercayaan dan penjelasan yang menilai dan mengakui bahwa keragaman etnis dan budaya dalam pengalaman sosial, gaya hidup, identitas pribadi maupun kelompok sangat penting untuk dipahami dan dimaklumi (Banks, 1993: 8). Dengan memahami dan memaklumi keberagaman budaya yang ada, maka sama halnya masyarakat sedang menanam dan menumbuhkan hubungan persaudaraan yang erat dalam bermasyarakat. Kemudian Musa As'arie menambahkan bahwa pendidikan multikultural menjadi proses penanaman cara hidup yang harmonis, tulus, toleran, dan saling menghormati dalam keanekaragaman yang ada di lingkungan masyarakat plural (Asy'arie, 2004: 1). Oleh karena itu menumbuhkan sikap toleransi sangat berperan penting untuk menghadapi perbedaan-perbedaan di masyarakat yang plural untuk mencegah perpecah belahan antar masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Farida mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural menjadikan seseorang untuk menerima sebuah

perbedaan, kritik, dan memiliki sikap toleransi dan rasa empati kepada sesama tanpa memandang status, golongan, gender, budaya maupun kemampuan akademik (Hanum, 2005: 6). Dengan tidak memandang derajat manusia dari segi fisik maupun materi, maka itu disebut sebagai masyarakat berbudaya, menerima perbedaan sebagai bentuk toleransi terhadap realita kehidupan. Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu gagasan penting yang harus dipahami dan dimiliki oleh setiap individu. Tantangan globalisasi yang menyebar secara masif di kehidupan masa sekarang dapat menjadi ancaman bagi kebudayaan bangsa, karena dikhawatirkan bangsa Indonesia akan mudah terbawa arus hingga akhirnya kehilangan jati diri lokal dan nasionalnya. Maka dari itu pendidikan multikultural dapat dijadikan strategi penyeimbang untuk mengelola kebudayaan dengan memberikan penyadaran di dalam mekanisme pendidikan yang menghargai perbedaan budaya.

2. Tujuan Pendidikan Multikultural

Mengutip pendapat Lawrence J. Saha dari buku *Landasan Pendidikan Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*: Saha (Neolaka dan Neolaka, 2017:540) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan multikultural dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: tujuan yang kaitannya dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran. Tujuan pendidikan yang kaitannya dengan sikap (*attitudinal goals*) merupakan proses pengembangan kesadaran dan kepekaan budaya, toleransi

budaya, penghargaan terhadap identitas budaya, sikap responsif terhadap kultural, serta keterampilan untuk meresolusi dan menghindari konflik. Tujuan yang kaitannya dengan aspek pengetahuan (*cognitive goals*) merupakan usaha memperoleh pemahaman tentang budaya dan bahasa orang lain, dan kemampuan menerjemahkan maupun menganalisis perilaku budaya, dan pemahaman tentang kesadaran perspektif budaya. Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang kaitannya dengan pembelajaran (*instructional goals*) merupakan usaha untuk memperbaiki distorsi, stereotipe dan kesalahpahaman mengenai kelompok etnis dalam media dan buku teks pembelajaran, memberikan macam-macam strategi untuk menuntun perbedaan di depan orang, memberikan gambaran konseptual untuk komunikasi antar budaya, mengembangkan ketrampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, menjelaskan klasifikasi nilai maupun dinamika budayanya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural bertujuan agar manusia dapat memahami, menghormati, dan menghargai perbedaan antar sesama demi terciptanya perdamaian dan persaudaraan yang erat.

3. Pendekatan Pendidikan Multikultural

Menurut Choirul Mahfud, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu:

Pertama, mengubah pandangan antara pendidikan dengan persekolahan. Pandangan mengenai pendidikan harus dipahami secara

luas sebagai perantara antara peserta didik dan pendidik, di mana tanggung jawab utama dalam mengembangkan kompetensi kebudayaan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik individu, lembaga sekolah maupun masyarakat.

Kedua, menghindari pandangan menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Artinya, dalam konteks pendidikan multikultural tidak perlu secara terus-menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam berbagai macam kegiatan. Sebaliknya, interaksi dengan kebudayaan lain akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih luas mengenai kesamaan dan perbedaan dari berbagai budaya.

Ketiga, menekankan bahwa dalam pengembangan kompetensi kebudayaan membutuhkan interaksi dengan orang-orang yang telah memiliki kompetensi. Maka dari itu apabila ada yang mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik maka itu akan menghambat sosialisasi ke dalam budaya baru.

Keempat, pendidikan multikultural mampu meningkatkan kompetensi dalam beberapa budaya. Kebudayaan mana yang akan diadopsi, hal tersebut ditentukan oleh situasi dan kondisi secara proporsional.

Kelima, pendidikan multikultural di sekolah maupun di luar sekolah kemungkinan akan meningkatkan kesadaran akan kompetensi dalam beberapa budaya, sehingga dapat dijadikan sebagai pengalaman

moral dengan maksud menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi. Selanjutnya dapat mengembangkan sikap apresiasi melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada seseorang tersebut (Mahfud, 2006: 134-135).

Pendekatan di atas dilakukan dengan menekankan bahwa pendidikan dengan sekolah tidak sepenuhnya sama, pendidikan dapat diakses tidak hanya di sekolah, tapi bisa dipelajari dari hal apapun, dari manapun dan oleh siapapun. Sehingga masyarakat tidak selalu memasrahkan sepenuhnya perihal pendidikan kepada instansi sekolah. Seseorang bisa mendapatkan pendidikan multikultural dari berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Apabila terbiasa berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda, maka akan mendapatkan pengalaman moral untuk mengembangkan sikap terbuka dan mudah menerima perbedaan-perbedaan yang ada.

4. Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural

UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa telah merekomendasikan bahwa dalam pendidikan multikultural setidaknya harus memuat beberapa pesan. Rekomendasi tersebut di antaranya:

“Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Karena

itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara” (Salmiwati, 2013: 338).

Dari rekomendasi tersebut, didapati beberapa nilai multikultural dalam pendidikan, yaitu:

a. Nilai Toleransi

Toleransi merupakan kemampuan untuk dapat menghormati sifat-sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki orang lain. Selain itu, toleransi juga bisa dipahami sebagai sifat atau sikap menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian (pandangan, pendapat, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) orang lain yang bertentangan dengan kita. Atau dengan kata lain, hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) dan saling menghargai di antara keragaman (mutual respect) (Aulia dan Yamin, 2011: 6).

Namun perlu digarisbawahi di sini, toleransi dalam hal keagamaan bukan dimaknai sebagai sikap menerima ajaran agama-agama lain, seperti dalam hal kepercayaan. Melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk satu agama dalam pergaulan hidup dengan orang yang tidak seagama. Sebagai umat yang beragama, diharapkan dapat membangun sebuah tradisi wacana keagamaan yang menghargai keberadaan agama lain, dan bisa menghadirkan wacana agama yang tolerans dan transformative (Madjid, 2001: 39).

Sehingga dapat dipertegas bahwa toleransi bukanlah dimaknai sebagai mengakui kebenaran agama mereka, melainkan pengakuan terhadap agama mereka dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Selain itu, toleransi juga bukan berarti sikap kopromi atau kerjasama sama dalam keyakinan dan ibadah.

b. Nilai Demokrasi/kebebasan

Jika dilihat dari konteks kesejarahannya, konsep “demokrasi” ini pertama kali muncul di Yunani dan Athena, yaitu pada tahun 450 SM dan 350 SM. Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang ternama dari Athena yang juga seorang negarawan ternama, mendefinisikan demokrasi dalam beberapa kriteria: (1) pemerintah oleh rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas sebuah bakat, minat, keinginan dan pandangan; serta (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk menemui dan mengekspresikan kepribadian individual.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, penggunaan istilah demokrasi ini pun terus berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, demokrasi tetap mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan akhirnya adanya sistem

pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.

Jika nilai demokrasi ini dibawa ke ranah pendidikan, maka mengandung pengertian adanya pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses belajarmengajar antara pendidik dan peserta didik, serta keterlibatan lembaga pendidikan.

c. Nilai Kesamaan/kesetaraan

Kesetaraan yang memiliki kata dasar setara bisa disinonimkan dengan kesederajatan yang mempunyai kata dasar sederajat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sederajat ini memiliki arti sama tingkatan (kedudukan, pangkat). Dengan kata lain, kesetaraan atau kesederajatan ini menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain.

Kemudian, jika nilai ini dimasukkan ke dalam pendidikan adalah adanya proses pendidikan yang tidak menjadikan dan memperlakukan peserta didik satu lebih spesial dari peserta didik lainnya, atau sebaliknya menjadikan salah satu peserta didik lebih rendah dari peserta didik lainnya dengan alasan apa pun. Apakah itu terkait dengan fasilitas yang diberikan atau pun perlakuan dari pendidik atau lembaga pendidikan itu sendiri.

d. Nilai Keadilan

Keadilan memiliki kata dasar adil, atau yang dalam bahasa Arab adalah kata adl. Kata ini memiliki arti sama atau seimbang. Yang berarti pengakuan dan perlakuan yang sama antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita juga wajib mempertahankan hak hidup ini dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Karena bagaimana pun orang lain juga demikian, memiliki hak hidup seperti kita. Jika kita mengakui hak hidup orang lain, maka sudah selayaknya juga bagi kita untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, adil itu adalah bentuk dari keseimbangan dan keharmonisan antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban, termasuk dalam memberikan kesempatan yang lain untuk menuntut hak dan menjalankan kewajibannya.

Dalam hal ini, keadilan dapat diartikan sebagai membagi sama banyak, atau memberikan hak yang sama kepada orang-orang atau kelompok dengan status yang sama. Misalnya, semua peserta didik dengan kompetensi yang sama berhak mendapatkan nilai yang sama dalam mata pelajaran yang sama.

Selain itu, keadilan juga bisa diartikan dengan memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban, atau memberi seseorang sesuai dengan porsi kebutuhannya. Sebagai contoh, dalam pendidikan, orang tua bisa dikatakan adil jika dalam pembiayaan

pendidikan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing, meskipun secara nominal masing-masing anak tidak sama jumlahnya. Karena dalam hal ini, definisi adil yang berlaku adalah adil sesuai dengan porsinya, bukan adil yang membagi sama banyak seperti definisinya yang pertama.

5. Praktik Pendidikan Multikultural

Menurut al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan lalu menjadikan kelompok manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian dari perbedaan-perbedaan tersebutlah kemudian manusia dapat saling kenal-mengenal sebagai praktik pendidikan multikultural. Dengan pengenalan berbagai aspek kehidupan, semakin kuat pengenalan antara manusia maka semakin terbuka peluang untuk memberi manfaat. Perkenalan akan menghasilkan banyak pelajaran dan pengalaman yang dapat diambil guna meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Swt., yang implikasinya akan menghasilkan hubungan kedamaian dan kesejahteraan hidup dunia dan kebahagiaan akhirat.

Dalam ayat ini juga Allah Swt mengingatkan manusia bahwa perbedaan yang ada dalam kehidupan ini adalah suatu hukum Allah., dan derajat manusia tidak terletak pada perbedaan fisik manusia seperti warna kulit, suku, jenis kelamin, akan tetapi kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai, ketaatan kepada Allah-lah yang membedakan derajat manusia (Hamka, 1998: 209). Dalam Islam hal tersebut disebut

dengan toleransi (*Tasamuh*). Toleransi dapat ditunjukkan dengan sikap sabar dan menghargai keyakinan-keyakinan orang lain, pendapat mereka, dan amal-amal mereka meskipun bertentangan dengan keyakinan umat muslim dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita juga tidak diperbolehkan untuk menyakiti, mencela, dan menyerang orang lain yang tidak sejalan dengan pemahaman dengan kita (Hidayat, 2015).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan multikultural yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 sudah selayaknya dimiliki oleh setiap umat muslim agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik dengan agama atau kelompok lain.